

**PERAN CAMAT DALAM PEMBINAAN DESA DI KECAMATAN KRANGKENG  
KABUPATEN INDRAMAYU**

Oleh:

Ilham Setiawan<sup>1</sup>

Iman Soleh<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Wiralodra, Indramayu

<sup>2</sup>Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Wiralodra, Indramayu

Email:

[ilham.setiawan@unwir.ac.id](mailto:ilham.setiawan@unwir.ac.id)

[iman.soleh@unwir.ac.id](mailto:iman.soleh@unwir.ac.id)

**ABSTRAK**

Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini yaitu dikarenakan adanya indikasi bahwa pembinaan terhadap pemerintahan desa belum optimal seperti yang diharapkan, seperti masih banyaknya monografi desa yang kosong, struktur desa yang tidak terisi dan buku-buku administrasi pemerintahan desa yang juga belum terisi dengan jelas, disebabkan karena masih rendahnya bimbingan, supervisi, konsultasi dan pemberian pedoman yang diberikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Camat Dalam Membina Pemerintahan Desa di Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu.

Metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang disertai teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Dalam melakukan penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*.

Dalam penelitian ini, peranan camat dalam membina pemerintahan desa di Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dilihat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2008 tentang Kecamatan yaitu melalui bimbingan, supervise, konsultasi, dan pemberian pedoman. Dari hasil penelitian dari masing-masing indikator tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa peranan camat dalam membina pemerintahan desa di Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dapat dinyatakan cukup baik.

**Kata-Kata Kunci : Peran Camat, membina, pemerintahan desa**

**PENDAHULUAN**

Kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Maka dari itu kecamatan mempunyai fungsi menjalankan tugas pemerintah yang ada di tingkat ke wilayahan bagaimana memberikan pelayanan dan mengatur masyarakat, tugas pelayanan lebih menekankan upaya kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan disebutkan Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan diatas, jelas camat merupakan seorang pemimpin yang diberikan amanat dalam menjalankan proses pemerintahan di suatu wilayah kecamatan dibawah oleh bupati/ walikota serta memiliki wewenang yang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah. Pada Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 mengatakan bahwa tugas

camat melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan dan pada huruf (g) disebutkan salah satu tugas camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan. Dari penjelasan diatas jelas, peran camat sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan masyarakat, camat diembankan tugas untuk membina dan mengawasi pemerintah desa/kelurahan demi terciptanya suatu pelayanan masyarakat yang maksimal.

Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2008 Pasal 21 Tentang Kecamatan, pemerintah menugaskan camat sebagai kepala pemerintahan untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

Berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, bahwa Kecamatan Krangkeng merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Indramayu yang memiliki jumlah desa yang cukup banyak yakni 11 (sebelas) desa dengan jumlah penduduk mencapai 62.786 penduduk, kemudian bagaimana Camat dalam menjalankan amanat undang-undang tersebut, namun dari pengamatan awal penulis terdapat beberapa desa yang belum menjalankan tugas pelayanan masyarakat secara maksimal. Mengingat banyaknya desa serta jumlah penduduk yang tidak sedikit, dibutuhkan seorang pemimpin kecamatan yang kompeten dalam menjalankan perannya membina dan mengawasi pelayanan masyarakat.

Pentingnya dilakukan pembinaan administrasi desa dikarenakan administrasi adalah kelengkapan dari suatu organisasi pemerintahan, karena tanpa adanya administrasi tidak memungkinkan suatu kegiatan organisasi dapat dilaksanakan. Administrasi pemerintahan desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mencapai tujuannya itu pemerintahan desa yang mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan terwujudnya demokrasi secara nyata guna meningkatkan taraf hidup masyarakat (Wijaya, 2002;88).

Fenomena yang terlihat pada saat ini tidak tertatanya Administrasi Pemerintahan Desa, masih banyak buku registrasi desa yang belum terisi, struktur desa yang tidak terisi dan monografi desa yang kosong. padahal buku dan informasi tersebut tidak saja berguna bagi pembangunan desa tetapi juga bagi pembangunan daerah dan nasional, disamping itu hal tersebut menunjukkan tertibnya penataan administrasi di Pemerintahan Desa. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti ingin lebih mengetahui lebih dalam mengenai Peran Camat Dalam Pembinaan Desa di Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu.

## **KAJIAN TEORITIS**

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan Miftah Thoha (2012:10). Menurut Mintzberg dalam Siswanto dan Thoha (2012: 21 dan 12), ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

1. Peran Antarperibadi (Interpersonal Role), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar. Peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakan perincian lebih lanjut dari peranan antarperibadi ini. Tiga peranan ini dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Peranan sebagai tokoh (*Figurehead*), yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.
  - b. Peranan sebagai pemimpin (*Leader*), dalam peranan ini atasan bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya pemimpin, memotivasi, mengembangkan, dan mengendalikan.
  - c. Peranan sebagai pejabat perantara (*Liaison Manager*), disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang yang berada diluar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.
2. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (*Informational Role*), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi. Peranan interpersonal diatas Mintzberg merancang peranan kedua yakni yang berhubungan dengan informasi ini. Peranan itu terdiri dari peranan-peranan sebagai berikut:
  - a. Peran pemantau (*Monitor*), peranan ini mengidentifikasikan seorang atasan sebagai penerima dan mengumpulkan informasi. Adapun informasi yang diterima oleh atasan ini dapat dikelompokkan atas lima kategori : 1) *Internal operations*, yakni informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan didalam organisasi, dan semua peristiwa yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut. 2) Peristiwa-peristiwa diluar organisasi (*external events*), informasi jenis ini diterima oleh atasan dari luar organisasi, misalnya informasi dari langganan, hubungan-hubungan pribadi, pesaing-pesaing, asosiasi-asosiasi dan semua informasi mengenai perubahan atau perkembangan ekonomi, politik, dan teknologi, yang semuanya itu amat bermanfaat bagi organisasi. 3) Informasi dari hasil analisis, semua analisis dan laporan mengenai berbagai isu yang berasal dari bermacam-macam sumber sangat bermanfaat bagi atasan untuk diketahui. 4) Buah pikiran dan kecenderungan, atasan memerlukan suatu sasaran untuk mengembangkan suatu pengertian atas kecenderungan-kecenderungan yang tumbuh dalam masyarakat, dan mempelajari tentang ide-ide atau buah pikiran yang baru. 5) *Tekanan-tekanan*, atasan perlu juga mengetahui informasi yang ditimbulkan dari tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu.
  - b. Sebagai diseminator, peranan ini melibatkan atasan untuk menagani proses transmisi dari informasi-informasi kedalam organisasi yang dipimpinnya.
  - c. Sebagai juru bicara (*Spokesman*), peranan ini dimainkan manajer untuk menyampaikan informasi keluar lingkungan organisasinya.
  - d. Peranan Pengambil Keputusan (*Decisional Role*), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang di pimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya.

## METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif, menurut Subana dalam (Natsir, 2018:26) bahwa metode deskriptif adalah menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta atau keadaan serta fenomena yang sedang berlangsung selama dalam melaksanakan penelitian dan menyajikan data dengan secara objektif.

## PEMBAHASAN

Camat secara umum memimpin penyelenggaraan pemerintah, baik pemerintahan di desa maupun pemerintahan kelurahan, tugas pembangunan dan kehidupan masyarakat serta penyelenggaraan koordinasi atas instansi vertical. Sebagai pejabat Pembina pemerintahan desa

seharusnya camat mempunyai program pembinaan supaya pembinaan yang dilakukan terarah sesuai dengan maksud dan tujuan pemerintahan desa, agar pembinaan bisa berjalan dengan baik maka program pembinaan yang sudah dilakukan oleh Camat Krangkeng adalah sebagai berikut :  
1. Bimbingan

Bentuk bimbingan yang dilakukan yaitu dengan memberikan program pelatihan yang diberikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa tidak menjurus pada peningkatan tata administrasi pemerintahan desa, sementara pelatihan tata penyelenggaraan administrasi sangat dibutuhkan oleh pemerintahan desa karena itu merupakan tugas sehari-hari dan yang menentukan prospek otonomi desa adalah faktor manusia sebagai subyek penggerak (faktor dinamis) dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Faktor manusia haruslah baik, dalam pengertian moral maupun kapasitasnya maka dari itu diperlukan pelatihan terhadap penyelenggara pemerintah desa. Adapun program pelatihan yang diberikan oleh Camat kepada Pemerintah desa yang ada di Kecamatan Krangkeng dapat dilihat pada tabel dibawah berikut :

Tabel 1  
Kegiatan Pelatihan Dalam Rangka Pembinaan yang di ikuti oleh Aparatur Pemerintahan Desa

No	Waktu	Kegiatan	Sasaran	Pembina	Keterangan
1	2017	Pelatihan Manajemen bagi Kaur. Pemerintahan desa	Kaur Pemerintahan	Camat dan Instansi terkait	Sudah
2	2018	Pelatihan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa	Kepala Desa	Camat dan Instansi terkait	Sudah
3	2019	Pelatihan Fasilitas Peningkatan Kemitraan bagi usaha kecil mikro dan menengah	Kepala Desa	Camat dan Instansi terkait	Sudah

## 2. Supervisi.

Untuk tercapainya efektifitas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu diadakan suatu tindakan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, yang akan mengawasi jalannya administrasi yang akan diberikan oleh pemerintahan kepada para aparturnya. Dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia dikenal adanya pengawasan umum, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat dan pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung masing-masing staf.

Kegiatan pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh Camat Krangkeng sudah dijalankan apabila ada laporan yang tidak di segerka dikirimkan sesuai dengan waktu yang ditentukan pasti mengirimkan surat untuk mengingatkan desa-desa mana saja yang belum memberikan laporan. Namun untuk kegiatan pengawasan langsung tidak dilaksanakan secara berkala hal tersebut dikarenakan aktifitas dan jumlah desa di Kecamatan Krangkeng yang cukup banyak

## 3. Konsultasi

Konsultasi merupakan sebuah pertemuan/konvarensi untuk saling bertukar informasi dan saran. Dengan adanya konsultasi pemerintah desa bisa mengutarakan masalah-masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dengan adanya komunikasi yang baik maka proses konsultasi ini tidak akan sulit dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Krangkeng dan Kepala Desa Srengseng menyatakan hal yang tidak jauh berbeda bahwa dalam menjalin komunikasi dengan Camat Krangkeng belum terlihat baik, hal itu dikarenakan adanya kesibukan masing-masing dan kesulitan berkomunikasi dengan camat baik bertemu secara langsung maupun tidak langsung, terkadang dalam kegiatan kerja yang ada di desa camat tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut. Padahal pada dasarnya menjalin sebuah komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan, bila komunikasi baik maka hasilnya pun akan berbanding lurus sesuai dengan yang diharapkan.

## 4. Pemberian pedoman

Dalam menyelenggarakan sebuah tanggung jawab memang diperlukan pedoman sebagai acuan untuk melaksanakan tugas agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Pedoman bisa berupa Buku, undang-undang, juknis dan lain-lain. Hal yang dilakukan oleh Camat Krangkeng yaitu dengan memberikan buku-buku panduan sebagai dasar untuk bisa menunjang dan meningkatkan pemahaman tentang arti sebuah pekerjaan, karena hal itu diharapkan dapat memberikan banyak mamfaat yang bisa diambil dengan membaca buku dengan tidak adanya pemberian buku-buku tentang penyelenggaraan pemerintahan desa maka kinerja dari aparat desa tidak bisa diharapkan untuk bisa lebih

baik karena pemberian buku juga bisa membantu dan menambah pemahaman mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

### **KESIMPULAN**

Peran Camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu sudah dilaksanakan melalui pemberian pedoman, pemberian pengarahan, pemberian bimbingan, pemberian pelatihan dan pemberian supervise, namun ada beberapa yang belum terlaksana yaitu pengawasan secara langsung kepada pemerintahan desa yang ada di wilayah Kecamatan Krangkeng.

### **SARAN**

1. Baiknya dalam melakukan pembinaan diatur kembali di perihal rapat kerja agar bisa mengetahui lebih jauh kinerja aparatur desa dan lebih terjadwal dalam melakukan pembinaan,/pelatihan guna meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desanya.
2. Sebaiknya melakukan perencanaan yang matang dan lebih memperhatikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh masing-masing desa sehingga lebih tepat sasaran dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada tingkat pemerintahan desa.

### **REFRENSI**

Buku :

Pamudji.1980.*Pembinaan Perkotaan di Indonesia*.Jakarta: Ikhtiar.

Sarundajang.2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*.Jakarta:Pustaka Sinar

Siswanto&Thoha, Miftah. 2012. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.

Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Grafindo

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa